

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Alfan Arifudin, 2017, “Psikologi Pengemis Mengungkap Misteri Pengais Receh”, Gunung Sanudra, Malang.
- Ali Khomsan dkk, 2010, “Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin”, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta.
- Andi Tenri Citra Haris, 2020, “Solidaritas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan”, CV Fawwas Mediacta, Yogyakarta.
- Bachtiar, 2018, “Metode Penelitian Hukum”, Unpam Press, Tangerang.
- Bagong Suyanto, 2016, “Masalah Sosial Anak”, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Dimas, 2013, “Pengemis Undercover”, Titik Media Publisher, Jakarta.
- Ibnu Syamsi Haryanto, 2018, “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pendekatan Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial”, UNY Press, Yogyakarta.
- Ishaq, 2017, “Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Desertasi”, Alfabeta, Bandung.
- Nurul Qomar dkk, 2017, “Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)”, CV Social Politic Genius, Makasar.
- Muhaimin, 2020, “Metode Penelitian Hukum”, Mataram University Press, Mataram.
- Waryono Abdul Ghafur, Andayani, at all, 2012, “Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial”, Samudra Biru, Yogyakarta.
- Muhammad Lukman Hakim, 2020, “Kebijakan Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial”, Intelegensia Media, Malang.
- Yanuar Farida Wismayanti dkk, 2021, “Gelandangan dan Pengemis: Pelayanan Rehabilitasi Sosial Kelompok Marginal”, P3KS Press, Jakarta.

2. JURNAL

- Baktiawan Nusanto, "Program Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 17 No. 2, Tahun 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Jember.
- Ifni Amanah Fitri, "Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Indonesia", *Jurnal Sosial*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2019, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Dekie GG Kasenda dkk, "Tinjauan Yuridis terhadap Penanganan Pengemis dan Anak Jalanan di Masa COVID-19", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 6 No. 2, September 2021, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
- Abd. Rachman A. L, "Tinjauan Aspek Hukum terhadap Larangan Memberikan Sejumlah Uang atau Barang kepada Gelandangan dan Pengemis", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol. 23 No. 1, Tahun 2017, Universitas Pattimura Ambon, Maluku.
- Muhammad, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan di Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2021, IAIN, Bengkulu.
- Yusrizal dan Romi Asmara, "Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara)", *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* Vol. VIII Nomor 1, Mei 2020, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Aceh.
- Rahmi Ayunda dkk, "Kebijakan Kawasan Bebas Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam: Suatu Kajian Hukum Perspektif SDGs", *Jurnal Komunitas Yustisia Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 3, Tahun 2020, Fakultas Hukum Universitas Internasional, Batam.

Daud Rismana, “Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH)”, *Jurnal Hukum: Al-Adl*, Vol. XI No. 2, Juli Tahun 2019, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang.

Rufinus Hotmaulana Hutaeruk dan Dian Eka Putri, “Perlindungan Hukum terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam sebagai Akibat Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial”, *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 6 No. 1, Juni Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Internasional, Batam.

3. ARTIKEL

Arif Rohman, “Program Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan Terpadu Melalui Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga Berorientasi Desa”, *Workshop kementerian Sosial RI*, Jakarta, 2010.

Ani Mardiyati, “Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan dari Perspektif Sosial Budaya”, *Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)*, Kementerian Sosial RI, Yogyakarta, 2015.

4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Gelandangn, Pengemis, dan Anak Jalanan.

